

DAFTAR PUSTAKA

- Alfaruqi, I., & Kristianti, I. (2019). Analisis Potensi Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi: Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah). *Jurnal Akuntansi Maranatha*, 11(2), 199–210. <https://doi.org/10.28932/jam.v11i2.1915>
- Amelia, D., & Halim, A. (2021). Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Penyusunan Laporan Keuangan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman. *Behavioral Accounting Journal*, 4(1).
- Amrul, R., & Khotmi, H. (2016). Peranan Pengendalian Internal Dalam Mengantisipasi Kecendrungan Kecurangan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada 14 Desa di Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat). *Jurnal Valid*, 13(4), 384–389.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. (2007).
- Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak. *Transparansi dan Akuntabilitas untuk Tata Kelola Keuangan Negara Yang Baik*. (2018). Sungai Serayu Opak.
- Balitbang. (2021). *Pengelolaan Keuangan yang Baik Wujud Pemerintahan yang Baik*. Balitbang Hukum Dan HAM.
- Barlian. (2012). *Manajemen Keuangan*. Jakarta: Literata Lintas Media.
- Bolang, M. S., Sondakh, J. J., & Morasa, J. (2013). Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Pengalaman Terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat Kota Tomohon Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah. *Accountability*, 2(1), 151. <https://doi.org/10.32400/ja.2352.2.1.2013.151-163>
- BPKP. (2008). *Sekilas SPIP*. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Dadang, S., Ali, J. B., Azhar, A. H., & Ellen, R. H. (2019). *Manajemen Risiko* (S. P. Yudi & M. N. Nur (Eds.)). PT Remaja Rosdakarya.

- Devas. (2007). *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fitrianingtyas, D. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Studi Pada Kecamatan Blimbing Kota Malang) (Vol. 2).
- Gayatri, Latrini, M. Y., & Widhiyani, N. L. sari. (2017). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa untuk Mendorong Kemandirian Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 10(2301–8968), 175–182.
- Hasby, Taufik, T., & Ratnawati, V. (2018). Analisis Peran Inspektorat Dalam Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Ekonomi*, 26(4).
- Hindriani, N., Hanafi, I., & Domai, T. (2020). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun. *Focus Magister Ilmu Administrasi Upmi*, 15(3), 1–9. <http://journal.upmi.ac.id/index.php/fmiau/article/view/149>
- Hubaisy, Z., Suharsono, A., & Helpiastuti, S. B. (2014). Evaluasi Kinerja PDAM Kota Probolinggo dalam Perspektif Balanced Scorecard. *E-SOSPOL*, 1(1), 10–24.
- Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tengah (2019). *Laporan Keuangan Pemerintah Seagai Wujud Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara*. Sulawesi Tengah.
- KominfoKabJember. (2022). *Pemkab Jember akan Melakukan Percepatan SPIP ke Level 3*. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember.
- Mardiasmo. (2020). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah Good Governance*.

- Mukti, H. H. (2019). Impementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat di Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Perspektif: PP. No 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). *Indonesian State Law Review*, 2(1), 257–270.
- Mulyani, P., & Suryawati, R. F. (2011). Analisis Peran dan Fungsi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP/PP No.60 Tahun 2008) Dalam Meminimalisasi Tingkat Salah Saji Pencatatan Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 7(2), 102–116. <https://doi.org/10.33830/jom.v7i2.95.2011>
- Nisak, C., Prasetyono, & Kurniawan, F. A. (2013). Sistem Pengendalian Intern Dalam Pencegahan *Fraud* Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pada Kabupaten Bangkalan. *Jaffa*, 01(1), 15–22.
- Peraturan Bupati Jember Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember, (2023).
- Peraturan Bupati Jember Nomor 22 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten jember, (2010).
- Peraturan Bupati Jember Nomor 74 Tahun 2021 tentang Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten jember, (2021).
- Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, (2016).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, (2008).
- PNUD Governance*, 1997. (n.d.).

Pusdiklatwas BPKP. (2008). *Fraud auditing*.

Raharja, M., Pratiwi, R. N., & Wachid, A. (2017). Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah , Kabupaten Lamongan). *Jurnal Administrasi Publik (JAP), Universitas Brawijaya, Malang*, 3(1), 111–117.

Rahman, K. G. (2020). Sistem Pengendalian Internal dan Peran Audit Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan. *Bongaya Journal for Research in Accounting, Vol. 3*(No. 1), Hal. 20-27.

Syamsuwir, & Munaf, Y. (2020). Peran Inspektorat Dalam Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru. *Jurnal Kajian Pemerintah (JKP)*, 6(2).

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.

Tuanakotta, T. (2013). *Audit Berbasis ISA (International Standar Auditing)*. Jakarta: Salemba Empat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, (2004).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, (2014).

Zulanda, E., Maryanan, T., Mukhlis, M., & Rosalia, F. (2022). Pelaksanaan Lingkungan Pengendalian Dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Komisi Pemilihan Umum Provinsi (KPU) Lampung. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(6).